



Buletin Pekan

# Palestine UPDATE

edisi  
12

3 SEPTEMBER 2023

## Masa Depan Gencatan Senjata Semakin Suram

Baik delegasi Israel maupun Hamas, keduanya pulang dengan tangan kosong usai menghadiri undangan para mediator gencatan senjata di Kairo. Senin (26/8). Hamas menuntut pasukan Israel ditarik seluruhnya dari Jalur Gaza, lalu gencatan senjata diberlakukan total. Dilanjutkan dengan memberi akses bagi warga yang mengungsi di Selatan Jalur Gaza, kembali ke Utara, bersamaan dengan masuknya bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi Jalur Gaza. Baru kemudian memberlakukan pertukaran tawanan. Namun itu semua ditolak Israel.

Hamas berpegang kepada proposal 2 Juli yang diusulkan Presiden AS Joe Biden, yang kala itu juga disetujui Israel. Tiba-tiba proposal tersebut direvisi, dengan usulan baru dari Amerika dan disetujui Israel. Perbedaan dua proposal tersebut terkait beberapa hal, yakni gencatan senjata tidak



lagi dilakukan permanen, meniadakan syarat penarikan total tentara Israel dari Jalur Gaza, memperketat pengawasan bagi warga yang kembali dari Selatan ke Utara, yang sebelumnya pada proposal 2 Juli tidak menyaratkan pengawasan.

Untuk akses masuk bantuan pun dirubah kebijakannya, yang semula disepakati masuk sejak awal pemberlakuan gencatan senjata,



kini harus berdasarkan kesepakatan dan syarat dari pihak-pihak yang terlibat. Usulan baru dari Netanyahu yang didukung Amerika yang tak konsisten, memperjelas posisi Netanyahu yang tidak menginginkan kesepakatan tercapai, secara bersamaan tidak mempedulikan nyawa warganya yang disandera di Jalur Gaza.

## Bahaya, Itamar Ben Gvir Akan Bangun Sinagog di Komplek Masjid Al-Aqsha

Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir berencana membangun Sinagog di areal Masjidil Aqsha, dengan cara merobohkan Al-Aqsha terlebih dahulu. Selama menjabat sebagai Menteri, sudah enam kali Ben Gevir masuk ke Al-Aqsha yang mengundang kemarahan umat Islam.





Rencana pembangunan Sinagog telah memancing reaksi keras negara Arab seperti Arab Saudi, termasuk mereka yang sudah melakukan normalisasi seperti UEA. Apabila dibiarkan, akan memicu perang agama di kawasan, terlebih pejuang Palestina selama ini melawan dengan dalih penistaan yang selama ini dilakukan Israel terhadap Masjidil Al-Aqsha.

Rencana ini didiamkan oleh Netanyahu, ditandai sikapnya yang tidak melarang tindakan Ben Gvir. Kesan pembiaran ini sebagai lampu

hijau dari rezim, yang selama ini menjadikan kubu sayap kanan sebagai sekutu utamanya, dengan sengaja menjadikan Ben Gvir untuk memanaskan kondisi di kawasan. Temple Mount (Bukit Bait Suci) sebutan Yahudi kepada Masjidil Aqsha, merupakan lokasi pembangunan Kuil Sulaiman. Identitasnya sebagai Masjid milik umat Islam perlahan diyahudisasi melalui ritual Talmud yang dilakukan secara ilegal di dalam areal masjid.

Tindakan ibadah Yahudi di dalam Masjidil Aqsha dengan jelas telah

melanggar aturan tahun 1967, yang pengelolaannya dipegang oleh Al-Quds Islamic Waqf, yang berafiliasi dengan Kementerian Wakaf Yordania. Aturan tersebut menetapkan Al-Aqsha hanya diperuntukkan untuk ibadah umat Islam. Adapun orang Yahudi hanya dibolehkan berziarah dan dilarang beribadah di dalamnya. Namun UU tersebut dilanggar oleh Israel sejak tahun 2003, dengan cara menyerbu masuk ke Masjid Al-Aqsha dan melakukan ritual Talmud di dalamnya.



### Kalah di Gaza, Israel Kini Perluas Pertempuran ke Tepi Barat

Operasi militer israel secara masif diperluas di Tepi Barat, dengan tujuan membungkam perlawanan pejuang Paletina dan memperluas kontrol mereka. Kondisi ini dikarenakan militer Israel dihadapkan dengan perlawanan mematikan dari pejuang di Tepi Barat, jauh di luar prediksi mereka. Disamping itu Israel ingin

mendapatkan kesan menang dalam operasi militernya selama ini, setidaknya menang di Tepi Barat, karena operasi militer di Jalur Gaza selama ini dinilai gagal oleh banyak pihak.

Israel menginginkan Tepi Barat diperlakukan seperti Gaza secara operasi militer. Tersiar rencana untuk mengosongkan Tepi Barat, dengan merelokasi penduduknya ke Yordania. Operasi di Tepi Barat

menargetkan zona A dari Kesepakatan Oslo, yang sejatinya di bawah kontrol militer Otoritas Palestina, yang berusaha diambil alih secara militer oleh Israel. Namun hingga kini pihak Otoritas Palestina yang dipimpin Mahmud Abbas tidak memprotes dan melakukan perlawanan untuk membela wilayahnya.

Scan untuk ikuti Kabar Palestina Terkini

